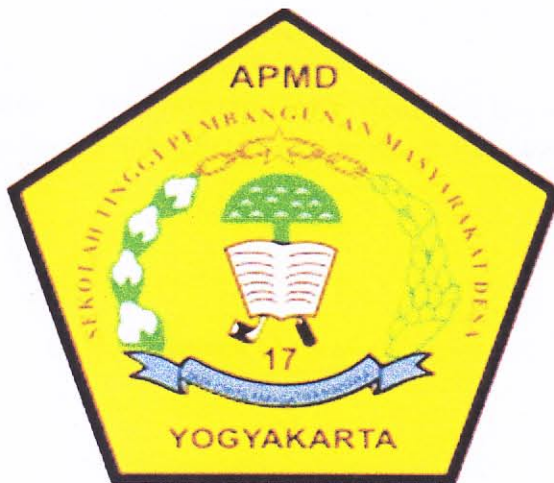


**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* PEMERINTAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA-KYOTO JEPANG**



**Disusun Oleh :**

**SARI LESTARININGSIH**

**No. Mhs : 13520199**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**



**PELAKSANAAN KERJASAMA *SISTER PROVINCE* PEMERINTAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA-KYOTO JEPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan  
Jenjang Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2016**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016



Sari Lestariningsih

NIM : 13520199

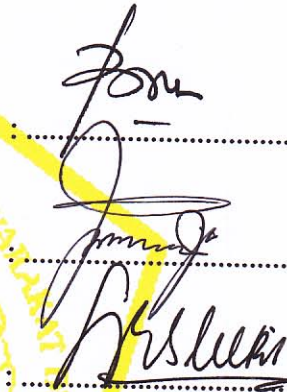
**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA SEKOLAH TINGGI  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD” YOGYAKARTA**

Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Oktober 2016  
Jam : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

**TIM PENGUJI :**

1. Ir. Muhammad Barori, M.Si  
Dosen Pembimbing
2. Drs. Parwoto, M.Si  
Penguji Samping I
3. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D  
Penguji Samping II



Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
YOGYAKARTA  
Gregorius Saldan, S.IP, MA



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
STPMD “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2016**

## MOTTO

**JANGAN MENYERAH TERHADAP SEGALA HAL TERUS**

**BERUSAHA PASTI AKAN ADA JALAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis menghaturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta-Kyoto Jepang** “ dengan baik tanpa kendala dan halangan apapun.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terlepas tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan lainnya dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga akhir penulisan.
4. Bapak Drs. Parwoto, M.Si selaku dosen penguji samping I yang telah memberikan masukan dan kritikan yang mendidik bagi penulis untuk perbaikan skripsi ini

5. Ibu Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku dosen penguji samping II yang telah memberikan masukan dan kritikan yang berharga bagi penulis untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
7. Kepada kedua Orang Tua, kakak dan adik penulis yang selalu memberikan Doa dukungan arahan mereka sehingga seluruh perkuliahan dari awal hingga akhir dapat diselesaikan penulis dengan baik.
8. Kepada semua teman – teman ilmu pemerintahan angkatan 2013 yang selalu saling memberikan dukungan.
9. Buat Ino yang selalu membantu, menyemangati dan menemani selama penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>INTISARI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
1. Kerjasama Luar Negeri .....	8
2. Sister Province.....	14
3. Pelaksanaan Kerjasama .....	19
F. Ruang Lingkup Penelitian .....	27
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Sumber Data .....	28
3. Obyek Penelitian .....	28
4. Subyek Penelitian .....	28
5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
6. Unit Analisis .....	30



7. Teknik Analisis Data .....	31
-------------------------------	----

## **BAB II PROFIL SISTER PROVINCE DIY-KYOTO PREFECTURE**

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta .....	34
B. Profil Kyoto.....	40
C. Kerjasama Sister Province Pemerintah DIY-Kyoto .....	45

## **BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA SISTER PROVINCE PEMERINTAH DIY-KYOTO JEPANG**

A. Deskripsi Informan .....	54
B. Latar Belakang Kerjasama Sister Province .....	58
C. Pelaksanaan Kerjasama Sister Province .....	62
D. Manfaat Kerjasama Sister Province .....	71

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

### **Daftar Pustaka**

### **Daftar pertanyaan**

### **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan luas daerah Menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	36
Tabel II.3 Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY .....	37
Tabel II.4 Jenis kegiatan dalam kerjasama DIY-Kyoto .....	53
Tabel III.1 Deskripsi informan berdasarkan nama dan jabatan .....	55
Tabel III.2 Deskripsi informan berdasarkan tingkat usia .....	56
Tabel III.3 Deskripsi informan berdasarkan jenis kelamin .....	56
Tabel III.4 Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan .....	57
Tabel III. Susunan Organisasi Komite Bersama .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Model Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III .....	23
Gambar II.1 Peta Wilayah daerah Istimewa Yogyakarta .....	34
Gambar II.2 Presentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen) ....	35
Gambar II.3 Peta Kyoto Prefecture .....	42

## INTISARI

Pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama di dunia. Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Selain itu sama juga halnya dengan negara di tengah sistem global, negara dianggap tidak efektif dan efisien dengan upaya interaksinya dengan berbagai mitranya. Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (provinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Kondisi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto yang tetap berjalan dengan sangat baik, bahkan menjadi contoh bagi pelaksanaan *sister province* bagi daerah lainnya.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan dari kerjasama *sister province* pemerintah DIY-Kyoto. Dalam menganalisis pelaksanaan kerjasama tersebut, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah kerjasama luar negeri, *sister province*, pelaksanaan kerjasama. Sedangkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi atau laporan-laporan.

Suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama *sister province* masih kurangnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah DIY dengan pihak Kyoto komunikasi yang dijalin hanya melalui media telepon dan email, juga struktur birokrasi dalam hal ini komite bersama yang dibentuk belum bekerja secara optimal. Namun kerjasama ini telah memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah DIY.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kecenderungan kesadaran bahwa setiap Negara bangsa di dunia tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh Negara lain melalui sebuah kerjasama. Seiring perkembangan kerjasama tersebut, lahir pula aktor-aktor baru seperti Pemerintah Daerah. Jika selama ini kerjasama awalnya hanya dilakukan antar Pemerintah Pusat sebuah Negara, maka saat ini, Pemerintah Daerah pun dapat secara aktif turut serta dalam kerjasama luar negeri, hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya hubungan kemitraan antar pemerintah daerah (*Sister Province*)<sup>1</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua perangkat hukum tersebut menandai dibukanya paradigma baru yang memberi kemungkinan daerah untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing atau luar negeri. Di samping itu, dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, telah membuka peluang keikutsertaan daerah sebagai salah satu

---

<sup>1</sup>Setelah adanya UU Nomor 21 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

komponen dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Selain itu sama juga halnya dengan negara di tengah sistem global, negara dianggap tidak efektif dan efisien dengan upaya interaksinya dengan berbagai mitranya.

Adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri, tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya, baik yang berupa potensi alam maupun manusia, untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah agar dapat melaksanakan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Caranya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan daerah otonom lain. Tidak hanya kerjasama antar daerah otonom di Indonesia, tetapi juga kerjasama dengan daerah (provinsi, kabupaten, kota) di luar negeri. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional untuk saling bekerjasama, baik berupa kerjasama *sister province* maupun *sister city*.

Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak ingin melewatkan peluang untuk menjalin kerjasama internasional yang berupa kerjasama *sister province* sebagai instrumen untuk meraih peluang yang ada. Kerjasama Pemerintah DIY dengan Pemerintah setingkat di luar negeri yang dikenal dengan sebutan *Sister Province* dilaksanakan atas dasar mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penyerahan urusan kepada Daerah, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tercantum pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 193/1652/PUOD, tanggal 26 April 1993, perihal: Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) Dalam dan Luar Negeri.

Salah satu kerjasama *Sister Province* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan *Kyoto Prefecture*, Jepang. Kerjasama antar kedua belah pihak sudah terjalin begitu lama tepatnya pada 16 Juli 1985 hingga sekarang. Kerjasama yang sudah terjalin begitu lamanya ini, telah menumbuhkan hubungan saling pengertian (*mutual understanding*) dan mampu menumbuhkan persahabatan (*friendship*) bagi keduanya, yang tidak lain merupakan salah satu manfaat yang ditimbulkan dari terjalinnya kerjasama *Sister Province*.

Adanya tututan kebutuhan dari masing-masing daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, Pemerintah DIY menyadari pemerintah Kyoto memiliki pengalaman lebih dalam pengelolaan potensi daerah. Adanya kesamaan antara kedua provinsi juga mendukung terjalinnya hubungan kerjasama *Sister Province* ini, yaitu keduanya sama-sama pernah menjadi ibukota negara dan juga kedua daerah mempunyai nilai-nilai perjuangan.

Kerjasama *Sister province* dan *sister city* di Indonesia sudah mulai muncul pada tahun 1970-an. Dengan berbagai motivasi di dalam awal munculnya kegiatan kerjasama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya sama-sama ibukota negara, contohnya Jakarta banyak melakukan kerjasama dengan berbagai ibukota negara dikarenakan sama-sama ibukota negara. Pada tahun 1980-an kerjasama internasional dalam bentuk *sister province* dan *sister city* semakin marak. Pada tahun 2004 tercatat lebih kurang 100 kerjasama internasional yang berbentuk *sisterhood* telah tercatat di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Dari catatan yang ada, mungkin tidak sampai 15% dari kerjasama tersebut yang berjalan dengan baik, dan tidak

sampai 20% berjalan dengan seadanya dan sisanya lebih dari 65% hampir tidak melakukan kegiatan apapun<sup>2</sup>.

Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Daerah DIY masih memiliki 9 (Sembilan) perjanjian kerjasama dengan daerah lain di luar negeri yang masih berlaku meliputi<sup>3</sup> :

1. *Sister Province* dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/ipitek, pariwisata, industri serta pertanian (pengembangan kultur jaringan) (*MoU Sister Province*).
2. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (*MoU Sister Province*).
3. Dengan Negara Bagian California, AS, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi perdagangan, pariwisata, industri, pendidikan dan kebudayaan serta pertanian (*MoU Sister Province*).
4. Dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi dan perdagangan, industri, pariwisata, kebudayaan serta ilmu pengetahuan (*MoU Sister Province*).
5. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri (*MoU Sister Province*).
6. Dengan Chungcheongnam-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang administrasi pemerintahan, budaya/seni, iptek, perdagangan dan industri,

---

<sup>2</sup> Eksplanasi volume 4 nomor 8 edisi oktober 2009

<sup>3</sup> LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014



pariwisata, informasi dan komunikasi , pertanian serta perikanan (*MoU Sister Province*).

7. Dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan lainlain (*MoU friendly ties cooperation*).
8. Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lain yang disepakati (*MoU friendly ties cooperation* ).
9. Dengan Provinsi St. Petersburg, Rusia, meliputi kerjasama bidang kebijakan ekonomi dan industri, iptek, kebudayaan dan pariwisata (*Letter of Intent / LoI*).

Tidak semua kerjasama tersebut berjalan lancar. Kerjasama dengan Provinsi Ismailia tidak lagi berjalan. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi hubungan kerjasama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto yang tetap berjalan dengan sangat baik, bahkan menjadi contoh bagi pelaksanaan *sister province* bagi daerah lainnya. Tingginya intensitas dari bentuk hubungan kerjasama antar pemerintah daerah ini menuntut keseriusan dalam menjalankan hubungan kerjasama yang ada. Penulis akan meneliti bagaimana pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kerjasama dengan pemerintah Kyoto Prefektur, lalu hasil apa saja yang diperoleh dari kolaborasi tersebut terhadap masyarakat Yogyakarta.

- b. Sumber Daya, Perlunya pemahaman tentang peta potensi masing-masing mitra kerjasama agar kerjasama dapat terlaksana dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak yang bekerjasama.
- c. Disposisi, perlu pelibatan masyarakat sipil dalam pembuatan keputusan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sehingga dapat lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat luas.
- d. Struktur Birokrasi, Memperbaharui (*up dating*) organisasi Komite Bersama sesuai dengan kelembagaan terkini, mengoptimalkan kinerjanya antara lain dengan cara menyusun program kerja tahunan dan adanya mekanisme pelaporan, dan evaluasi program setiap periode tertentu yang disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Idham Ibtu et.al (ed), Good Governance dan Otonomi Daerah Menyongsong AFTA Tahun 2003, Yogyakarta : Forkoma MAP, 2003.
- Dunn, William. 1994. Pengantar Analisa Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public policy*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Pamudji, 1985. *Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. Albany, NY: New York State Departement of State Division Of Local Government Services
- Pratikno, ed al mengelola dinamika politik dan sumberdaya daerah, Yogyakarta : PLOD Departeman dalam Negeri, 2004, hal.134-135.
- Rahayu, Iin Tri dan Tristiadi, 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: NuhaMedika.
- Syafei, Inu.K. 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Rineka Cipta
- Tania Dwi Lestari Putri, 2013, *Kedudukan Memorandum Of Understanding Dari Segi Hukum Perikatan*, Studi Ilmu Hukum.
- Villiers, J.C. 2009. *Success Factors and the City-to-City Partnership Manajemen Process-From Strategy to Alliance Capability*. Habitat International, 33(2), 149-156.
- Widodo, Joko, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi, 2013, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : PT. BukuSeru